

Diskursus Hukum: Marwah Demokrasi dan HAM Pasca Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19

**Oleh: Fathul Hamdani,
Fakultas Hukum Universitas Mataram**

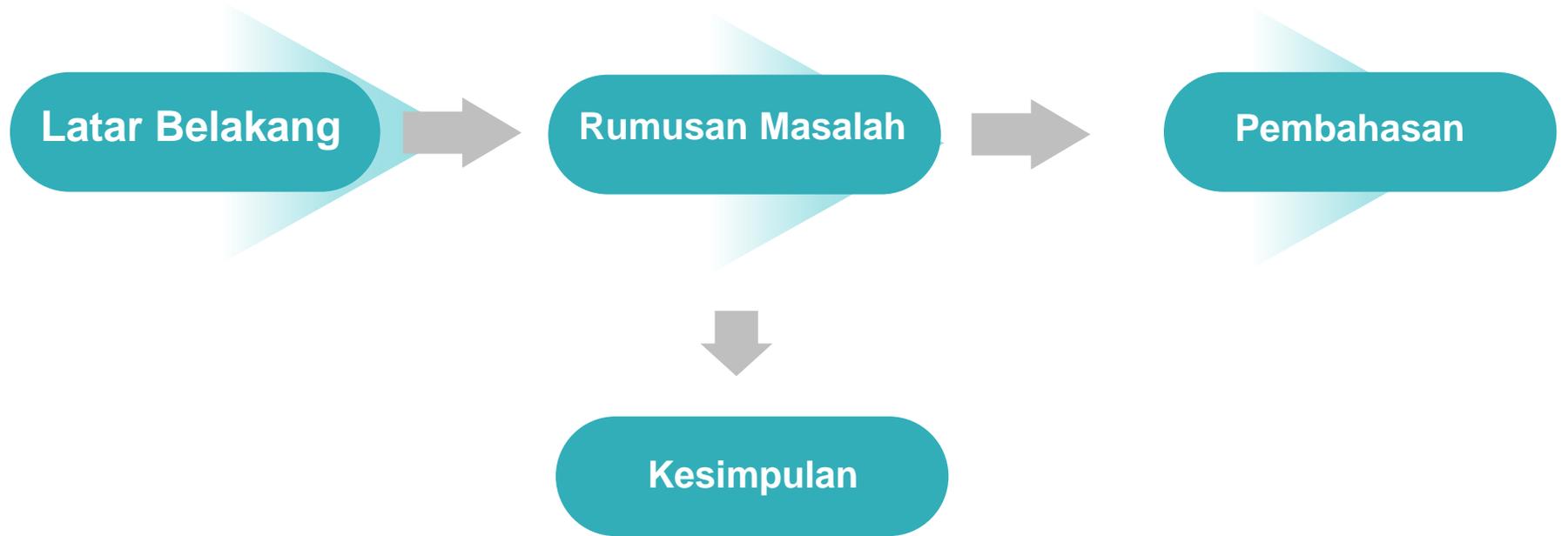
Headline

Latar Belakang

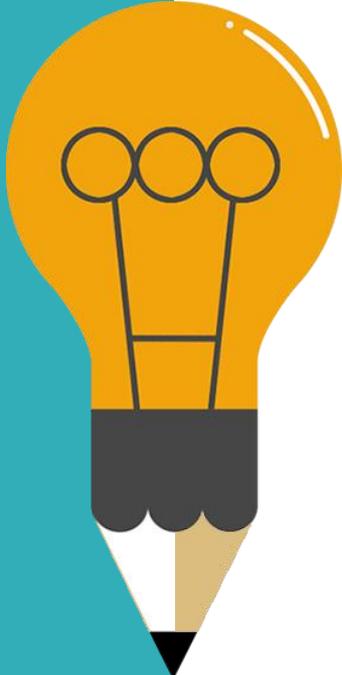
Rumusan Masalah

Pembahasan

Kesimpulan



Latar Belakang



01

Pelaksanaan Pilkada yang terkesan dipaksakan (tinjauan Perppu No. 2 Tahun 2020)

02

Munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 –
Pertaruhan antara demokrasi dan HAM

03

Semangat yang sama atas lahirnya konsepsi
demokrasi dan hak asasi manusia.

Rumusan Masalah

01

Bagaimana hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia?

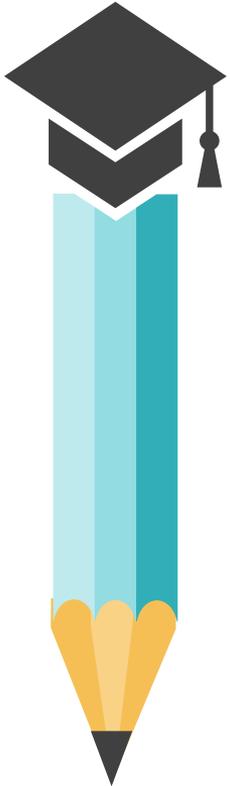
02

Bagaimana implikasi yang timbul pasca Pilkada Serentak 2020 di era pandemi Covid-19 terhadap marwah demokrasi dan penegakan hak asasi manusia?

03

Bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah dalam hal terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang diakibatkan oleh pelaksanaan Pilkada Serentak?

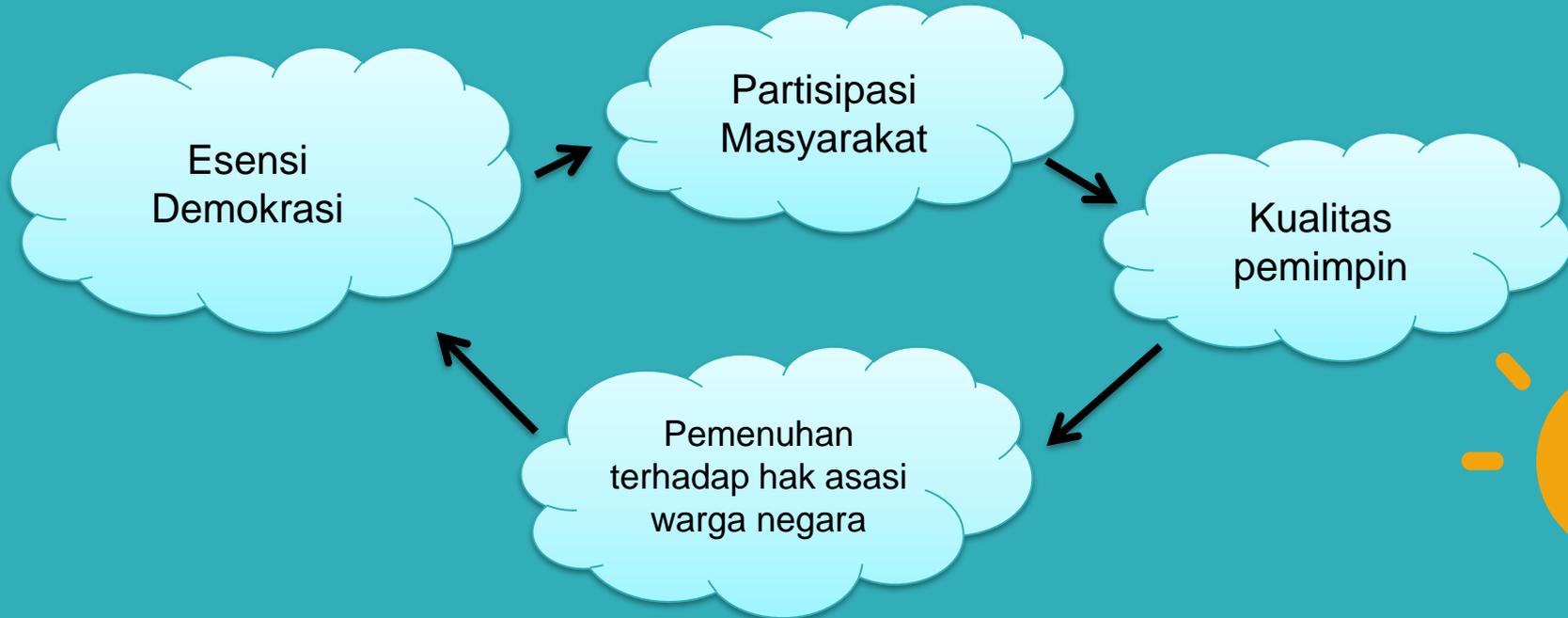
Pembahasan



Hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia

- Konsep negara hukum Indonesia (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
- Demokrasi dan Hak Asasi Manusia merupakan konsepsi yang lahir atas semangat kemanusiaan
- Lahirnya teori kontrak sosial: Untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, yang berpuncak pada Konstitusi – Jaminan atas hak asasi manusia.

Implikasi yang timbul pasca Pilkada Serentak 2020 di era pandemi Covid-19 terhadap marwah demokrasi dan penegakan hak asasi manusia



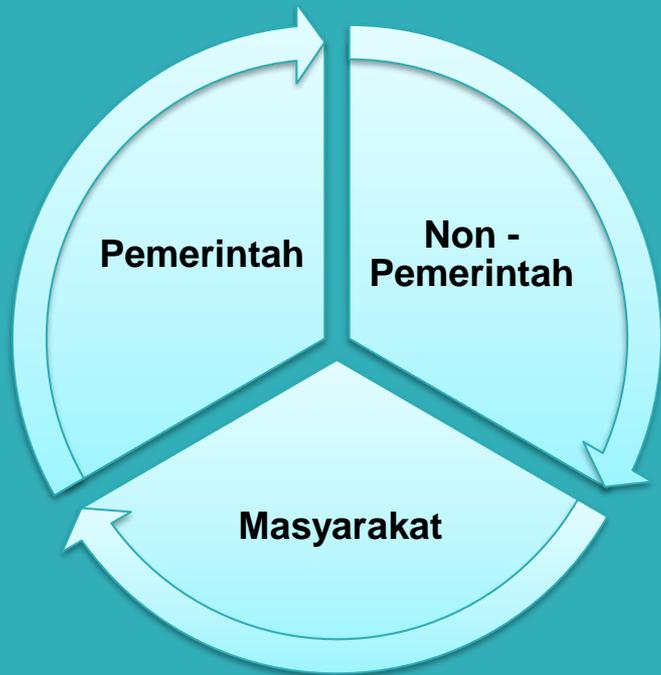
Pertanggungjawaban Pemerintah dalam hal terjadi peningkatan kasus Covid-19

- Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”.

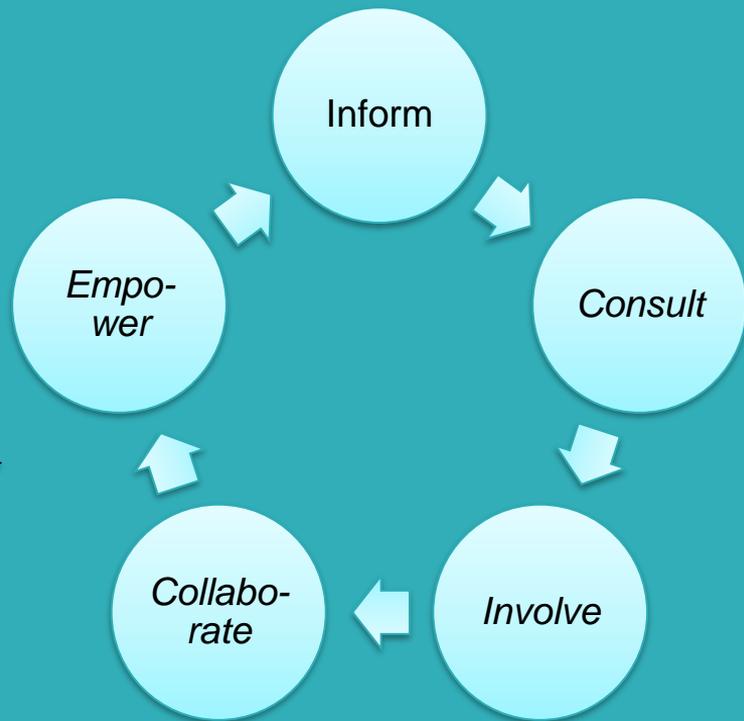


Data percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia (17/12), total kasus positif meningkat 7.354 dibanding 16 Desember menjadi total 643.508 dengan jumlah kematian 19.390 jiwa. Sementara untuk yang sembuh berjumlah 526.979 orang.

Jumlah kasus sekarang meningkat sekitar empat kali lipat dibandingkan dengan 4 September 2020 lalu saat pendaftaran calon pilkada dibuka yang berjumlah sekitar 180 ribu kasus (BBC News Indonesia).



Trust



KESIMPULAN



01

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia bukanlah suatu konsep yang saling menegasikan. Sehingga dalam pelaksanaan demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga tidak boleh dilupakan.

02

Marwah demokrasi dan penegakan HAM berbanding lurus atas kualitas dari demokrasi itu sendiri, baik itu kualitas pemimpin yang dihasilkan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

03

Dibutuhkan langkah responsif dari Pemerintah dalam menyikapi peningkatan kasus Covid-19 sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atas hak asasi manusia.



Thank you